

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI
DALAM POLIS ASURANSI JIWA SERTA PENGAWASAN
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

Esi Rahmadani
2220112048

Pembimbing:

- 1. Dr. M. Hasbi, S.H., M.H**
- 2. Dr. Wetria Fauzi, S.H., M. Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM POLIS ASURANSI JIWA SERTA PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

**(Esi Rahmadani, 2220112048, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 104 Halaman, 2025)**

ABSTRAK

Perkembangan asuransi sebagai pengalihan risiko seringkali menimbulkan ketidakseimbangan informasi, dimana perusahaan asuransi lebih menekankan keuntungan produk tanpa menyampaikan informasi lengkap terkait pengecualian. Adanya pencantuman klausula eksonerasi yang ditetapkan secara sepihak dalam perjanjian baku membatasi atau menghapus kewajiban perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa serta mengetahui bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, *pertama* Bagaimana akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa? *Kedua* Bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian seringkali ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi dalam perjanjian baku yang dapat membatasi atau menghapuskan kewajiban perusahaan asuransi. Kurangnya transparansi informasi terkait dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam polis asuransi dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara baik dan benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang polis. Adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dalam bidang perasuransian dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang polis akibat tindakan penyalahgunaan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Asuransi Jiwa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**LEGAL CONSEQUENCES OF THE INCLUSION OF AN EXONERATION
CLAUSE IN LIFE INSURANCE POLICIES AND SUPERVISION BY THE
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK)**

**(Esi Rahmadani, 2220112048, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University,
104 Pages, 2025)**

ABSTRACT

The development of insurance as a risk transfer often causes an information imbalance, where insurance companies emphasize the benefits of the product without providing complete information related to exclusions. The inclusion of an exoneration clause that is unilaterally stipulated in the standard agreement limits or removes the company's obligations and causes losses to policyholders. This study aims to find out what are the legal consequences of including an exoneration clause in a life insurance policy and to find out how the supervisory function carried out by the Financial Services Authority (OJK) on the inclusion of an exoneration clause in order to provide legal protection to policyholders. This study discusses two problem formulations, first, what are the legal consequences of including an exoneration clause in a life insurance policy? Second, what is the supervisory function carried out by the Financial Services Authority (OJK) on the inclusion of the exoneration clause in order to provide legal protection to policyholders? This study uses a normative research method with secondary data as the main legal material and is analyzed qualitatively. The results of this study show that the exoneration clause in the agreement is often unilaterally stipulated by the insurance company in the standard agreement which can limit or eliminate the liability of the insurance company. Lack of transparency of information related to the inclusion of an exoneration clause in an insurance policy can lead to the non-fulfillment of consumers' right to obtain information properly and correctly, causing losses to policyholders. The existence of the Financial Services Authority as a supervisory institution in the insurance sector can be used as one of the efforts to provide legal protection and certainty for policyholders due to the abuse of the exoneration clause carried out by insurance companies.

Keywords: Exoneration Clause, Life Insurance, Financial Services Authority (OJK).